

**PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN BIDANG PERIKANAN  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011-2013**

**Engla Boy Doli Saputra**

Email : engla.boy40@gmail.com

**Pembimbing:** Drs. H Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294  
Telp/Fax: 0761-63277

**Abstract**

*Implementation of program ekonomi kerakyatan in fisheries Kabupaten Kampar 2011-2013, the providence of rolling fund in Desa Koto Mesjid encounter some problem, one of them is the process of fund return of the rolling fund that is not coherse with the villagers expectation. The goal of the spirit of implementation of program ekonomi kerakyatan that point to Tri Sukses that is, success in the distribution, success in the achievement, and success in the return. This is the reason that i become interested to study in my research. The main problem in my research is "why the implementation of program ekonomi kerakyatan in fisheries, providence of the rolling fund in Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar still not implemented effectively.*

*The goal of this research is to understand the process mechanism of the implementation of the program ekonomi kerakyatan in fisheries Kabupaten Kampar 2011-2013, providence of rolling fund in Desa Koto Mesjid, and than to analize the implementation of program ekonomi kerakyatan in fisheries, and than study about the obstacle in the implementation. This research is done in Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. This research is using quantitative research metode with descriptive metode in collecting data. Researcher using the method of interview, observation, and dokumentation with a key informan as the main resource of information and using multiple question to the informan with observing the fenomenon that exist in the legality of the datas.*

*Based in the research that is concluded that the process of the implementation and the obstacle in program ekonomi kerakyatan in fisheries Kabupaten kampar 2011-2013, providence of the rolling fund is not implemented efectively and not coherse with the guide provided in Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 about the guide of the implementation of the rolling fund program ekonomi kerakyatan kabupaten kampar.*

**Keywords :** *Program Ekonomi Kerakyatan, Providence of the rolling fund, Fisheries Agency Kabupaten Kampar.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi di Indonesia menjadi permasalahan utama yang sebenarnya sangat berpengaruh karena perekonomian menjadi dasar suatu negara untuk dapat berkembang. Perekonomian di Indonesia saat ini memakai sistem ekonomi kerakyatan yaitu dimana sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk itulah diperlukan bantuan dari pemerintah yang memang sudah seharusnya memperhatikan nasib masyarakat dan pemerintah harus menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Ekonomi Kerakyatan itu sendiri adalah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar Ekonomi Kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Penyelenggaraan Dana Bergulir tersebut diarahkan pemanfaatannya untuk membiayai kegiatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, baik di Sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan Juga Pada Sektor Koperasi.

Melalui Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2002 tanggal 01 Juni 2002, tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2002, kemudian diperkuat dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 113 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2002, tentang penjabaran anggaran pendapatan kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002.

Agar Implementasi Program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya Petunjuk Umum yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi setiap institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan pinjaman Dana Bergulir di Kabupaten Kampar. Maka Bapak Bupati H. Jefry Noer membuat suatu Keputusan Bupati Kampar Nomor : 239 Tahun 2002 Tentang Pentapan Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Dana Bergulir Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2002.

Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati Kampar inilah dasar hukum atau sebagai payung hukum dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Ekonomi Kerakyatan penyelenggaraan Dana Bergulir kemudian dilanjutkan dengan mengucurkan Dana untuk Kegiatan Program Ekonomi Kerakyatan Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kampar sebesar Rp.40.000.000.000,-.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 239 Tahun 2002 Tentang Pentapan Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2002. Tujuan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir ini adalah :

1. Memperkuat aspek permodalan dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki agar masyarakat mampu meningkatkan kinerja usahanya.
2. Membuka usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3. Mewujudkan Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi yang

mandiri dan tangguh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang mendukung peningkatan ekonomi Daerah.

4. Meningkatkan produksi kebutuhan pokok masyarakat dan memperluas jangkauan pesertanya secara lebih ekonomis

Desa Koto Mesjid sebagai salah satu Desa Otonom yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar adalah salah satu desa yang mendapatkan Program Ekonomi Kerakyatan Penyelenggaraan Dana Bergulir di Kabupaten Kampar di Bidang Perikanan. Desa Koto Mesjid dengan luas wilayah 54 ha, dan penduduk 2068 orang, dengan 535 kk.

Dengan potensi alam yang mumpuni ini menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perikanan memilih melaksanakan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. permasalahan yang dihadapi oleh para petani budidaya kolam ikan patin ini yakni permasalahan permodalan. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupten Kampar untuk Desa Koto Masjid sendiri di Bidang Perikanan telah Menyerap Dana Bergulir Bidang Perikana Budidaya Kolam Ikan Patin sebesar Rp. 3,829,000,000.00

**Tabel I.1**  
**Lokasi Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan**  
**Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid**  
**Kecamatan XIII Koto Kampar**

<b>Desa</b>	<b>Dusun</b>	<b>Jenis Usaha</b>
Koto Mesjid	Dusun I Koto Mesjid	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun I Picuran Bilah	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun II Kampung Baru	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun II Koto Mesjid	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun II Picuran Gading	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun III Kampung Baru	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun III Koto Mesjid	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun IV Kampung Baru	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun IV Koto Mesjid	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun IV Picuran Gading	Budidaya Ikan Air Tawar
	Dusun Koto Mesjid	Budidaya Ikan Air Tawar

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2013

Dari tabel I.1 diatas terhitung ada 11 Dusun yang mengikuti Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir dari Tahun 2011-2013 di

Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. Tetapi setelah berjalan Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan Penyelenggaraan kegiatan Dana Bergulir ini pada waktu pengembalian Dana Bergulir belum terlaksana seperti diharapkan.

Melihat Data dari Dinas Perikanan, terdapat ketidak sesuaian Implementasi antara rencana dan tujuan semangat Trisukses yang ingin dicapai dari Program Ekonomi Kerakyatan Penyelenggaraan kegiatan Dana Bergulir Pelaksanaan yang terdapat di lapangan, oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan hal itu terjadi.

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut yang penulis rumuskan dalam satu judul penelitian yaitu : **Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013.**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan (*business policy*) itu bertingkat-tingkat dan tersusun secara vertikal, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum sampai pada kebijakan yang bersifat praktikal dan kongkrit. (Hodgetts dan Wartman 1975: 6 dalam Ndraha 2011: 492).

Kebijakan, *policy* menjadi dua, substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Mengklasifikan (Anderson 1984 : 113 dalam Nucholis 2005 :158)

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, yang bercirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari membuatnya maupun yang mentaatinya, proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut ini:

- a. Penyusunan Agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian pemerintah.
- b. Formulasi Kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi Kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mendapat hasil.
- e. Evaluasi Kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. (Micheal Howlet dan M. Ramseh menyatakan Dalam Subarsono 2009: 39 ).

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dengan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas, kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Nawawi (2011: 17).

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program, Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses evaluasi (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target evaluasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai program strategi pelaksanaan program Evaluasi

manfaat meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Teori program terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. Rencana Organisasi
2. Rencana Program dan pemanfaatan layanan
3. Pengaruh dari teori.

Komponen ini mengemukakan bagaimana intervensi yang dituju untuk populasi target menghasilkan benefit sosial yang diinginkan. Teori Program memainkan peran besar dalam evaluasi. (Menurut Rossi, Lipsey dan Freeman 2004 dalam Parson 2005: 345).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan serta untuk mempermudah dalam melaksanakan pengukuran maka peneliti merumuskan konsep penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan, mengurangi, dan menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
3. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dengan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas, kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program.
4. Dana Bergulir, adalah Dana Pemerintah Kabupaten Kampar yang ditempatkan pada lembaga

keuangan (BANK) dengan persyaratan yang telah ditentukan dan dipinjamkan langsung kepada masyarakat.

5. Petunjuk teknis adalah petunjuk yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dana bergulir dibuat oleh Dinas/Badan terkait.dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan ekonomi kerakyatan kabupaten kampar.

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan tipe penelitian Deskripsi yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian langsung di Desa Koto Masjid dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisanya sehingga mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terperinci bagaimana adanya tentang perumusan masalah yang dihadapi, metode yang di gunakan adalah metode penelitian kuantitatif.

Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian penulis terkumpul, maka data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan serta di deskripsikan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan penelitian penulis ini. Selanjutnya penulis melakukan pembahasan yang bersifat kuantitatif dengan menganalisa data tersebut, lalu menarik kesimpulan, serta akhirnya memberikan saran-saran.

Desa yang terluas di Kecamatan XIII Koto Kampar adalah Desa Baluang dengan luas sekitar 60.000 hektar sekitar 65.19 % dari luas wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar. Daerah Kecamatan XIII Koto Kampar pada umumnya terletak di daerah dataran/hamparan, Danau PLTA, yang dilalui oleh sungai Kampar dan beberapa sungai kecil lainnya.

Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri dari 13 Desa Pusat pemerintahan Kecamatan terletak di Desa Batu Bersurat. Pada tahun 2014 jumlah aparat desa dan kelurahan diantaranya adalah jumlah Kepala Desa sebanyak 12 orang 1 orang lurah, Sekretaris Desa sebanyak 12 dan Sekretaris Lurah 1 orang, dimana sebanyak 12 orang sudah di angkat menjadi Pengawai Negeri Sipil, Ketua Rukun Warga (RW) sebanyak 98 orang, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebanyak 206 orang.

Di kecamatan XIII Koto Kampar terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di antaranya UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan, PLKB, UPTD Pertanian dan Kantor Urusan Agama (KUA).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan tipe penelitian Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian

langsung di Desa Koto Masjid dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisisnya sehingga mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terperinci bagaimana adanya tentang perumusan masalah yang dihadapi, metode yang di gunakan adalah metode penelitian kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Desa Koto Masjid merupakan salah satu desa yang mendapat dana bergulir ekonomi kerakyatan khususnya di bidang perikanan di Kabupaten Kampar.

Informan peneliti merupakan orang yang benar-benar atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta member informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu :

### a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang di peroleh dan dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan wawancara (*interview*), pengamatan langsung atau observasi yang berupa identitas responden dan hasil tanggapan/jawaban responden

tentang bagaimana pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data, informasi, dan keterangan dari instansi yang berhubungan dalam penelitian yang peneliti lakukan sekarang sebagai bahan pelengkapan penelitian. Data yang dimaksud berupa arsip, buku- buku, dokumentasi serta laporan tertulis yang bertautan atau berhubungan dengan penjelasan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Wawancara (*Interview*)
- 2) Observasi atau pengamatan langsung
- 3) Dokumentasi

Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian penulis terkumpul, maka data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan serta di deskripsikan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan penelitian penulis ini. Selanjutnya penulis melakukan pembahasan yang bersifat kuantitatif dengan menganalisa data tersebut, lalu menarik kesimpulan, serta akhirnya memberikan saran-saran.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Tahapan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013 Mekanisme Penyelenggaraan Dana Bergulir.**

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pencapaian Program serta kesesuaian yang ingin di capai oleh pembuat Kebijakan serta Peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Program Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar, dari segi tahapan-tahapan yang telah di tetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan dalam Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan Dana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar Penyelenggaraan Dana Bergulir, yaitu masyarakat mengajukan permohonan ke Dinas/Badan terkait, kemudian Dinas/Badan terkait meneliti kelengkapan persyaratan, melakukan analisa kelayakan usaha teknis di lapangan dan kondisi riil kegiatan fisik. Selanjutnya meneruskan permohonan masyarakat kepada Bank melalui Tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar. Tim Verifikasi melakukan pembahasan proposal, meneliti kembali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan mengeluarkan berita acara sebagai dasar pencairan pinjaman di Bank oleh debitur (masyarakat).

Khusus bagi usaha komoditi (Pertanian, Perkebunan, Perikanan

dan Peternakan) yang bermitra, wajib menyertakan rekomendasi dari dinas teknis dan atau perusahaan mitra. Untuk peminjaman debitur menyambung, bagi debitur yang meminjam untuk tahap berikutnya tetap diberlakukan persyaratan awal, kemudian bagi debitur yang dapat diberikan fasilitas pinjaman tahap berikutnya yaitu debitur yang memiliki kolektibilitas lancar (1) dan kolektibilitas kurang lancar (2). Penanganan kredit bermasalah dan penetapan sanksi, penyelamatan kredit bermasalah dapat melalui (a) Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur, jangka waktu, perubahan jumlah angsuran dan atau perpanjangan grace periode. (b) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, penggantian debitur, penggantian usaha, penggantian dan/atau penambahan jaminan serta persyaratan lainnya sepanjang tidak menyakuti perubahan maksimum plafond kredit. (c) Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Penanganan kredit bermasalah perlu mempertimbangkan atas itikad, kemampuan dan kesempatan usaha nasabah. Apabila hal ini terpenuhi, maka dapat dilakukan Restrukturisasi kredit yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan

perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi kredit bermasalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) Debitur mempunyai itikad baik;
- b) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
- c) Debitur memiliki prospek usaha dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi dan/atau;
- d) Debitur mengalami bencana alam.

Tindakan penyelamatan berdasarkan analisis kriteria pertimbangan sebagai berikut: Kemauan mendukung, kemauan tidak mendukung, kesempatan kurang mendukung dan jaminan mendukung dilakukan penjadwalan kembali.

## **B. Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013 Penyelenggaraan Dana Bergulir.**

Tahapan Permohonan masyarakat mengajukan permohonan kepada Bank PD BPR Sarimadu melalui Dinas/Badan terkait dan langsung diserahkan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar (memalui Sekretariat Tim Verifikasi) sesuai dengan bidang usaha sebagai berikut:

- 1) Usaha Perindustrian, Perdagangan dan Jasa ditujukan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan.
- 2) Badan Usaha, Koperasi, Yayasan, Baitul Mall Wattanwill (BMT), Usaha Kecil dan Mikro ditujukan ke Dinas Koperasi dan UKM.

- 3) Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura ditujukan ke Dinas Pertanian dan Peternakan.
  - 4) Usaha Perkebunan ditujukan ke Dinas Perkebunan.
  - 5) Usaha Perikanan ditujukan ke Dinas Perikanan.
  - 6) Usaha Peternakan ditujukan ke Dinas Petanian dan Pertenakan
- Usaha Kelompok Petani Kecil (KPK) ditujukan ke Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP).

Adapun dalam tahapan permohonan meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat proposal permohonan kepada Lembaga keuangan melalui Dinas terkait guna mendapatkan pinjaman Dana Bergulir.
2. Mensosialisasikan syarat-syarat permohonan peminjaman Dana Bergulir kepada masyarakat.
3. Mengetahui kriteria usaha yang ditetapkan oleh pemerinatah untuk mendapatkan pinjaman Dana Bergulir.

Permohonan masyarakat yang diantarkan langsung ke Tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar diserahkan terimakan ke Dinas/Badan terkait. Dinas/Badan terkait dapat didampingi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar melakukan seleksi dan penilaian terhadap :

1. Aspek Kelengkapan Administrasi dan Survey Lapangan;
2. Melakukan Analisa Kredit;

Tim Verifikasi Kabupaten bersama Bank PD. BPR Sarimadu dalam membahas permohonan masyarakat yang telah direkomendasi Dinas/Badan terkait sebagai berikut :

1. Meneliti kembali keabsahan persyaratan administrasi pemohon dan melakukan penjaminan analisa kredit.
2. Melakukan Cros Check terhadap debitur yang melakukan pinjaman Double Financial (pinjaman ganda).
3. Bersama dengan Tim Teknis Dinas/Badan dapat melakukan survey lapangan terhadap calon peminjam (Debitur).
4. Tim Verifikasi, Dinas/Badan dan Bank PD. BPR Sarimadu secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang muncul.
5. Menetapkan hasil keputusan Tim Verifikasi terhadap calon penerima pinjaman Dana Bergulir.

Prosedur Pencairan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank menerima Berita Acara Pembahasan dan Berkas Proposal dari Tim Verifikasi Kabupaten.
2. Bank membuat jadwal Pencairan Pinjama/Kredit bagi nasabah dan menginformasikan kepada Dinas/Badan terkait.
3. Debitur (Peminjam) mempersiapkan/membawa:
  - a. Membawa KTP dan KK Asli
  - b. Membawa Borought/Jaminan Asli yang dicantumkan dalam proposal
  - c. Membawa rekening tabungan pada Bank PD. BPR Sarimadu.
  - d. Menghadirkan Suami-Istri dan atau Ahli Waris yang dicantumkan dalam proposal.
4. Bank memeriksa keabsahan berkas permohonan nasabah.
5. Pihak Bank berkewajiban membacakan dan menjelaskan

isi akad kredit kepada debitur sebelum penandatanganan akad kredit.

6. Bank dapat membebaskan biaya administrasi dan asuransi jiwa kepada nasabah.
7. Setelah penandatanganan akad kredit dilakukan, Bank memindahbukukan Dana dari rekening penampungan sementara Dana Bergulir ke rekening tabungan debitur penerima Pinjaman Dana Bergulir sejumlah akad kredit.

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui :

- a. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*).
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*).

Penanganan Kredit bermasalah perlu mempertimbangkan atas itikad, Kemampuan dan Kesempatan Usaha nasabah. Apabila hal ini terpenuhi, maka dapat dilakukan *Restrukturisasi* kredit yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai itikad baik;
- b. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
- c. Debitur memiliki prospek usaha dan perbaikan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi dan/atau;
- d. Debitur mengalami bencana alam atau *Force Major*.

Bagi kredit yang tidak dapat diselesaikan atau diselamatkan, maka dapat ditempuh dengan somasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Surat teguran pertama berlaku 7 hari kerja
2. Surat teguran kedua berlaku 10 hari kerja setelah surat teguran pertama
3. Surat teguran ketiga berlaku 30 hari kerja setelah surat teguran kedua
4. Apabila surat peringatan ketiga tidak ditindaklanjuti, maka dapat diajukan somasi melalui pihak pengacara negara (Kejaksaan), sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Hambatan Hambatan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013 Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid.**

Pelaksanaan Dana Bergulir Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan di Desa Koto Mesjid Tahun 2011-2013 mengalami beberapa hambatan atau kendala. Melihat dari segi pelaksanaan kegiatan dana bergulir ini dapat dilihat bahwa tingginya persentase jumlah nasabah yang tidak mengembalikan dana pinjaman lunak tersebut, karena adanya kesalahan teknis dalam penentuan jangka waktu pinjaman dengan potensi keberhasilan usaha. Asumsi sebagian nasabah bahwa dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan dana bantuan. Sementara sebagian nasabah yang lain tidak mengembalikan pinjaman karena pendapatan yang mereka peroleh dilakukan reinvestasi pada

pengembangan usaha mereka, dan manakala sebagai disebabkan lemahnya dalam pengawasan usaha dan sistem penagihan pinjaman yang belum tersistem dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Kepala Seksi Budidaya Perikanan yaitu ibu Zulkarnita Sukna, Spi Hambatan Atau Kendala Pelaksanaan Dana Bergulir Program Ekonomi Kerakyataan Bidang Perikan Di Desa Koto Mesjid Tahun 2011-2013 Yaitu:

1. Faktor alam
2. Faktor petugas pendamping teknis
3. Faktor masyarakat

## KESIMPULAN

Dengan telah disajikannya hasil dan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu penulis membuat keputusan atas hasil yang di peroleh dari penelitian yang dilaksanakan Penelitin ini berupaya untuk mendeskripsikan dalam penelitian Program Ekonomi Kerakyataan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kampar pada Tahun 2011-2013 di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar berupa point-point sebagai berikut:

1. Tahapan Program Ekonomi Kerakyataan Kabupaten Kampar dalam mekanisme Penyelenggaraan Dana Bergulir, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diulas pada Bab III belum terlaksana dengan efektif dan juga tidak mencapai dari tujuan dan pencapaian yang hendak diharapkan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Dana Bergulir Program Ekonomi Kerakyataan Kabupaten Kampar.

2. Pelaksanakan Program Ekonomi Kerakyataan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih belum berdaya guna bagi masyarakat dan tidak terlaksana secara efektif dalam pelaksanaan yang telah berjalan pada tahun 2011 sampai 2013.

3. Adapun Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyataan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir di Desa Koto Mesjid berikut ini dalam bentuk point-point :

a) Terjadinya wabah penyakit ikan yaitu dan terutama terjadi di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar sehingga masyarakat  $\pm$  50 orang nasabah dana bergulir mengalami kerugian dan tidak bisa mengangsur kredit dana bergulir.

b) Tidak adanya itikad baik dari nasabah itu sendiri untuk mengangsur kreditnya.

c) Adanya sebagian kecil nasabah yang mengalihkan usaha ke usaha lain seperti ke usaha dagang, peternakan, perkebunan sehingga kredit tidak dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

d) Pengaruh Isyu-Isyu yang berkembang bahwa dana tersebut adalah dana hibah dari pemda (terikut-ikut dengan orang lain)

e) Terjadinya fluktuasi harga ikan dimana pada waktu-waktu tertentu terjadi penurunan harga yang sangat rendah sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan dan mengakibatkan sulit mengembalikan kredit pinjaman dana bergulir.

f) Tingginya harga pakan ikan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan dan mengakibatkan sulitnya mengembalikan kredit dana bergulir.

g) Adanya sebagian nasabah yang uang hasil panennya dilarikan oleh pedagang ikan (tidak dibayar toke).

h) Adanya sebagian nasabah yang meninggal dunia setelah jatuh tempo sedangkan kehidupan ahli waris sangat sulit untuk mengembalikan kredit pinjaman.

i) Terdaptnya beberapa nasabah yang pindah alamat / lari tanpa diketahui alamat yang baru.

j) Faktor kejenuhan kolam ikan yang di isi secara terus menerus sehingga pertumbuhan ikan tidak berhasil dengan baik.

Sebagai saran yang di anggap berguna untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar terutama kepada Dinas Perikanan selaku aktor yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam mengurus dan melaksanakan Program Ekonomi Kerakyatan Bidang Perikanan Penyelenggaraan Dana Bergulir :

a) Menjalankan sanksi sesuai ketetapan juknis terhadap masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman(menunggak).

b) Dalam pelaksanaan program perlu adanya monitoring yang rutin untuk melihat perkembangan usaha masyarakat dalam menjalankan usahanya

c) Dalam pelaksanaan program ekonomi kerakyatan bidang perikanan Dinas hendaknya memberikan pembinaan kepada petani ,sehingga dana

yang diberikan benar-benar mampu atau dapat meningkatkan perekonomian para petani .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari formula kepenyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas Gramedia

N, Dun Wiililiam. 2006. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grapindo

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Nucholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan*, dan

- Otonomi Daerah. Jakarta : Grasindo
- Nugraha D Rian. 2007. *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy* (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan). Yogyakarta: Graha Press.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rianto, Adi. 2014. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Snowball Sampling. Jakarta : Granit Press.
- Sherraden Michel. 2006. *Aset Untuk Orang Miskin*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- B. Skripsi**
- Rian Wahyu. 2014. *Pengawasan Terhadap Usaha Bidang Perikanan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012* (Studi Kasus Pengawasan Pengusaha Ikan di Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Usman. 2015. *pelaksanaan Program Pengembangan Produksi Ikan Kolam Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2010-2013*. (studi kasus Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- C. Dokumen**
- Amandemen UUD 1945 BAB XIV Pasal 33 Ayat 1 sampai Ayat 5.
  - Amandemen UUD 1945 BAB X Pasal 27 Ayat 2.
  - Amandemen UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 Ayat 1 Sampai Ayat 4.
  - Peraturan Bupati Kampar Nomor: 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2013.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 02 Tahun 2002, Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2002.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 01 Tahun 2003, Tentang Penetapan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2003.
- g. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 113 Tahun 2002, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
- h. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 188 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
- i. Keputusan Bupati Nomor: 239 Tahun 2002 Tentang Penetapan Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2002.
- j. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.